

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Akuntansi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama	Irfan Putra Zehun
NPM	20510010
Program Studi	Akuntansi
Judul Skripsi	Perbandingan Intern atas Penyisihan Kredit Modal Keris Pada PT Bank Sumut Medan

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk monevitas Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Akuntansi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama



(Dami Tunji Sibero S.E., M.Si., Ak.)
NIDN : 0114017801

Dekan



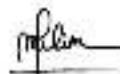
(Dr. E. Himmangian Sallagan S.E., M.Si)
NIDN : 0126047902

Pembimbing Pendamping



(Halimatus Salim S.E., M.Si) (Dr.E.Martano Berliana Lumbas Gual, S.E., M.Si., Ak, CA)
NIDN : 0122018101

Ketua Program Studi



NIDN : 0127018102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit merupakan salah satu instrumen utama dalam dunia perbankan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penyaluran kredit, bank memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, konsumsi, dan modal kerja. Namun, proses penyaluran kredit ini juga mengandung risiko yang signifikan, baik bagi bank maupun bagi nasabah itu sendiri. Peran Penting Pengendalian Internal untuk meminimalkan risiko tersebut, bank perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan tertentu dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas serta efisiensi operasi. Dalam konteks penyaluran kredit, pengendalian internal berfungsi untuk, Mencegah penyaluran kredit kepada pihak yang tidak layak, Memastikan dana kredit digunakan sesuai perjanjian, Mencegah terjadinya fraud atau kecurangan, Meningkatkan efisiensi proses penyaluran kredit.

Pengendalian intern kredit merupakan aspek krusial dalam pengelolaan risiko kredit di sebuah lembaga keuangan. Serangkaian prosedur, metode dan kebijakan yang di rancang untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit

berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menghasilkan keputusan yang tepat. Sistem yang baik akan meminimalisir terjadinya kredit yang macet dan melindungi aset perusahaan dan menjaga integritas perusahaan.

Bank menawarkan berbagai jenis kredit yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial yang beragam, baik untuk individu maupun pelaku usaha. Ada beberapa jenis kredit yang umum ditawarkan yaitu. Kredit Multi Guna, Ditujukan untuk pegawai tetap, PNS, dan profesi tertentu. Biasanya digunakan untuk berbagai keperluan pribadi seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, atau konsumtif lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit yang disubsidi pemerintah dengan bunga rendah, ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kredit Modal Kerja, Ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehari-hari suatu usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Kredit Investasi, Digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang, seperti pembelian peralatan produksi, perluasan usaha, atau pembangunan gedung.

Peranan bank sangat membantu penyediaan modal dalam bentuk kredit karena tidak mungkin pembiayaan suatu proyek baik besar maupun kecil hanya didukung modal sendiri. Bank salah satu rekan kerja pemerintah yang dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan nasional guna membiayai proyek- proyek pembangunan ekonomi melalui pembiayaan investasi baik dalam investasi sumber daya atau modal kerja perusahaan.

Penelitian yang berkaitan dengan penyaluran kredit dilakukan (Yuwono, 2018), menjelaskan bahwa penyaluran kredit dikatakan berhasil pada suatu bank

apabila jumlah plafond yang diberikan sesuai dengan jumlah pengembalian dari para debitur. Hal ini menjelaskan bahwa kredit yang disalurkan oleh suatu bank kepada masyarakat dikatakan berjalan dengan lancar apabila tidak terjadi kredit macet. Selain itu (Sari dkk., 2020) juga melakukan penelitian dengan menyimpulkan bahwa penyaluran kredit dapat berjalan dengan lancar apabila bank memperhatikan prosedur penyaluran kredit dengan baik dan terpenuhinya syarat-syarat penyaluran kredit yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint, Covering* dan juga melaksanakan metode analisis 7 P (*Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dengan baik.

PT Bank sumut adalah bank milik pemerintah yang telah menyalurkan berbagai jenis kredit sekaligus menjadi bank andalan dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang. Pemberian kredit membutuhkan suatu sistem yang nantinya digunakan untuk menjalankan kredit, sistem tersebut dapat dijadikan pedoman bagi nasabah dalam pengajuan kredit terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap nasabah oleh pihak bank dengan menggunakan analisis 5C meliputi penilain terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*callateral*), dan kondisi ekonomi (*condition*). Selain itu juga memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan terjadinya tunggakan kredit atau kredit macet.

Masalah umum yang sering dihadapi oleh bank sumut dalam proses pemberian kredit yaitu analisis kredit yang kurang mendalam, seringkali penilaian terhadap debitur dalam melunasi utang kurang cermat baik dari segi keuangan dan

karakter. Bank harus benar-benar memperhatikan sistem pengendalian intern dalam pemberian fasilitas kredit sehingga resiko akan adanya kredit yang bermasalah dapat di perkecil. Kredit yang bermasalah ini dapat mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam menjaga kepercayaan diri masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengendalian intern diterapkan dalam penyaluran kredit Modal Kerja pada PT. Bank Sumut dan akan membahasnya dalam tugas akhir penulis dengan judul: **“Pengendalian Intern Atas Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Sumut Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengendalian Intern Atas Penyalurn Kredit Modal Kerja Pada PT Bank SUMUT Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian intern atas Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Sumut Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Untuk menambahkan wawasan bagi penulis dalam hal mengetahui sejauh mana pengendalian intern terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja disetiap perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian intern atas Penyaluran Kredit Modal Kerja

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut, kadek Hana Meiyani, 2023 Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Hamonangan Siallagan, 2021 “bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote”.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Dari pengertian bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Dimana sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari saham kota (*clearing*) penagihan-penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar

negeri (inkaso), bank garansi, bank notes dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, Ngurawan dkk., 2021 adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pengertian kredit diatas merupakan kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam bahasa latin berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya. Maka pihak yang memberikan kredit bahwa pihak yang menerima kredit pasti akan membayar kembali dengan ketentuan yang ditetapkan bank. Kredit

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur pemberian kredit menurut Effendhi, 2019 sebagai berikut:

a. Kepercayaan.

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan kepada pihak penerima kreditur akan mengembalikan atau akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

b. Kesepakatan

Adapun unsur kesepakatan ialah mengandung kesepakatan antara kreditur dengan kreditur. Kesepakatan ini dituangkan didalam perjanjian dan ditandatangani oleh pihak hak dan kewajibannya.

c. Tenggang Waktu

Setiap kredit yang ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu untuk mengembalikan kredit yang telah disepakati. Dan jangka waktu tersebut bisa jangka waktu pendek (di bawah satu tahun), jangka waktu menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka waktu panjang (di atas tiga tahun)

d. Risiko

Akibat adanya jangka waktu yang diberikan maka Semakin panjang jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank maka semakin besar risiko yang diterima oleh pihak kreditur, maka pengembalian kredit akan memungkinkan terjadinya risiko tidak tertagih atau disebut kredit macet.

e. Timbal Balik

Balas jasa bagi pihak bank yaitu keuntungan yang diberikan suatu kredit atau jasa disebut juga dengan nama bunga. Selain bunga pihak bank juga memberatkan biaya administrasi kredit yang dapat menguntungkan pihak bank.

2.2.3. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit secara umum dibedakan sesuai dengan bentuk kredit, jangka waktu dan tujuan penggunaan kredit menurut : Utami & Hasan, 2018,

Jenis Kredit Menurut Bentuknya

a. Kredit Rekening Koran

Kredit yang secara langsung akan dimasukkan ke rekening giro nasabah. Debitur diberi hak atas penarikan dana dari rekening giro kapan saja sebatas plafon yang diberikan. Kredit rekening koran tergolong dalam kredit jangka pendek (paling lama satu tahun)

b. Installment Loan

Installment loan merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jumlah angsuran selama masa kredit, kecuali bila dalam perjanjian kredit ditentukan bunga mengambang, yaitu tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan bunga di pasar. Dalam *installment loan* angsuran merupakan penjumlahan antara pembayaran angsuran pokok ditambah dan bunga.

1. Jenis kredit menurut jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan kurang dari satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek diberikan untuk modal dan kredit rekening koran.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah antara satu sampai tiga tahun. Kredit ini biasanya diberikan kepada investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang diberikan oleh pihak bank lebih dari jangka waktu 3 tahun. Kredit ini umumnya diberikan pada KPR dan kredit investasi.

2. Jenis Kredit Menurut Penggunaanya

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk menggandakan barang-barang modal atau dalam rangka investai perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka pemberian kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan oprasional kebutuhan antara lain kebutuhan dana untuk menutupi piutang perusahaan, kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pertumbuhan produk barang atau jasa.

c. Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumen yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi

2.2.4 Analisis Kredit

Sebelum kredit diputuskan, perlu di analisis terlebih dahulu kelayakan kredit tersebut. Tujuannya untuk menghindari kredit yang di biayai nantinya tidak layak' kalau ini terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidak mampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman macet.

Beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menemukan kelayakan suatu kredit, yaitu menurut Divianitasya & Aslamiyah, 2022 Dengan Lima (5) yaitu:

- a. *Character*, ialah suatu keyakinan yang mampu melihat sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang si nasabah baik dari latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi.
- b. *Capacity*, ialah untuk melihat nasabah dalam bidang jenis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diatur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu juga kemampuan dalam menjalankan usaha ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam melunasi kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dilihat dari pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital ini di liat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang.

d. *Collateral*, untuk menjamin keamanan dalam proses peminjaman dan cara pelunsannya maka diperlukan jaminan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan sangatlah penting untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu membayar bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.

e. *Condition of economic*

Dalam hal penilaian terpenting dalam pemberian kredit untuk melihat kondisi ekonomi dan politik dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dan prospek usaha dari sektor yang akan dijalankan.

1. Dengan Konsep Tujuh (7) P

a. *Personality* (kepribadian)

Yaitu nilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya dalam sehari-hari maupun masa lalu.

b. *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam pengambilan kredit.

c. *Party* (kelompok)

Yaitu untuk mengklasifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas dan karakter.

d. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

e. *Prospect* (prospek)

Untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak.

f. *Profitability* (tingkat keuntungan)

Dilihat dari kemampuan nasabah dalam mencari laba dan melihat usaha yang dijalankan semakin meningkat atau tetap sama atau dapat dipertimbangkan dalam penambahan kredit.

g. *Protection* (perlindungan)

Untuk menjaga agar usaha dan jaminan usaha dapat perlindungan.

2.2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama dari pemberian kredit menurut yaitu:

1. Mendapat Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Terutama dari suku bunga yang diterima oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan.

2. Mendukung Usaha Nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dari investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan perluas usahanya.

3. Mendukung Pemerintah

Bagi pemerintah makin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak pembangunan di berbagai sektor.

Adapun keuntungan yang didapatkan pemerintah yaitu:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara

Adapun fungsi:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang dengan arti jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi bunga untuk menghasilkan barang dan jasa oleh si penerima kredit.

2. Meningkatkan Peredaran dan Lalulintas Uang

Dengan hal ini uang yang diberikan akan disalurkan, akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga satu daerah yang diuntungkan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan menerima tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit juga dapat menambah dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar bertambah.

4. Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan adanya kredit dapat sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan maka, bertambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dan mengekspor barang dari dalam keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

5. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu dapat menambah modal untuk meningkatkan usaha apalagi dengan modal terbatas.

6. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik terutama untuk meningkatkan pendapatan. Seperti jika penerima kredit membuka usaha pabrik maka akan membutuhkan tenaga kerja.

7. Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjam internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit, pemberian kredit dapat meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.2.6. Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut Siti Komaria, Oktariansyah, Emilda, 2015 “ Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikeluarkan”. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Mengirin file, pemohon kredit khusus proposal disampaikan. Tambahan file atau tambahan apapun yang diperlukan saat itu.
- b. Penyelidikan ke dalam file pinjaman, penting untuk memastikan bahwa berkas yang diserahkan akurat dan lengkap sesuai dengan persyaratan jika pemohon kredit ingin proses dengan cepat.
- c. Wawancara satu, ini adalah investigasi terhadap calon peminjam secara langsung.
- d. Saat ini, tugas pemeriksa lapangan ini meliputi pemeriksaan sebagai barang yang akan digunakan sebagai jaminan atau untuk tujuan komersial.
- e. Pertemuan kedua, merupakan kegiatan perbaikan file setelah selesai di lapangan, file masih bermasalah.
- f. Penilaian kredit, keputusan kredit dalam hal ini akan menemukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika disetujui akan disiapkan oleh pihak administrasi, jika tidak maka akan dikirimkan surat penolakan serta penjelasan yang sesuai
- g. Penandatanganan kontrak, berfungsi sebagai jaminan yang mengikat secara hukum atas surat perjanjian atau persyaratan penting, harus ditandatangani oleh calon konsumen sebelum kredit diberikan. Penandatanganan akan dilakukan oleh pihak bank dan debitur baik secara langsung maupun notaris.
- h. Realisasi kredit, setelah dokumen yang ditandatangani dan rekening giro atau tabungan dibuka di bank terkait, kredit akan direalisasikan.

- i. Pendistribusian atau penarikan dana, pencairan, di sebut juga penyaluran dana dari rekening, atau penarikan, berfungsi sebagai realisasi pemberian kredit dan memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan kondisi dan tujuannya.

2.2.7 Kredit Macet

Resiko terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur, terjadinya kredit macet kemungkinan karena adanya pengaruh negosiasi dari calon debitur dengan petugas bank agar hasil kredit sesuai keinginan calon debitur, sehingga terkadang pemberian kredit lebih besar dari kebutuhan dan juga kemungkinan masih ada calon debitur yang memberikan keterangan baik-baik saja tentang usahanya.

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Faktor-faktor penyebab kredit macet

- a. Berdasarkan prospek usaha
 1. Kelangsungan usaha yang diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih Kembali
 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
 3. Manajemen yang sangat lemah
 4. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi
- b. Berdasarkan keuangan debitur

1. Mengalami keugian yang besar
 2. Debitur tidak mau memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
 4. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian oprasional
- c. Berdasarkan kemampuan membayar
1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada

2.3 Pengendalian Intern

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam memberikan kredit pada debitur hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan *profitabilitas*

1. Menurut, Irawati & Satri, 2018 bahwa pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

2. Menurut, Ngurawan et al., 2021 pengendalian intern adalah struktur dan metode organisasi dengan menggunakan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan guna untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
3. Menurut, Ampuni, 2023 mengemukakan bahwa Pengendalian Internal merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya tujuan pengendalian internal tersebut. Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan yaitu: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern adalah yang digunakan perusahaan untuk menjaga harta kekayaan perusahaan tersebut, serta pengendalian intern tersebut juga berperan dalam melindungi aktiva, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum.

2.3.1 Tujuan Pengendalian Intern

Proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan tujuan terlebih dahulu. Berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai penetapan anggaran yang menunjukkan rencana

alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan.

Salah satu cara perusahaan untuk mencegah kecurangan akibat lemahnya pengendalian internal adalah dengan menerapkan pengendalian intern yang baik. Pengendalian intern merupakan alat yang diciptakan untuk membantu para manajer perusahaan dalam mengelola perusahaan. Pengendalian intern mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan data dengan tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengendalian Intern menurut, Nawangsari & Putra, 2018 ialah sebagai berikut:

1. Asset dilindungi dan digunakan untuk pencapaian usaha.
2. Informasi bisnis akurat.
3. Kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.
5. Tujuan perusahaan dapat tercapai

2.3.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Ampuni, 2023 (dalam jurnal Mulyadi 2016) untuk menciptakan sistem pengendalian yang baik di dalam perusahaan, maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Menurut, Hendri, 2019 Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah

fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan

dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat menurut Melisa & Siregar, 2021 adalah :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tecetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
- b. Pemeriksaan mendadak (*suprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi yang dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, sehingga mendorong setiap unit organisasi melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
- f. Secara periodik diadakan percocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik

harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.3.3 komponen pengendalian intern

Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan pengendalian intern. Melisa & Siregar, 2021 COSO menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan.

1. Lingkungan pengendalian. Hal ini mencakup etika kompetensi serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.
2. Penentuan resiko. Penentuan resiko mencakup penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui resiko.
3. Aktifitas pengendalian. Aktifitas aktifitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasin, rekonsiliasi, karyawan yang kompetendan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.
4. Informasi dan komunikasi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola, operasinya.
5. Pengawasan dan pemantauan. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada kmunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Kegiatan

utama dalam pengawasan meliputi supervise efektif, akuntansi pertanggung jawaban pengauditan internal.

2.4 Pengendalian intern kredit Modal Kerja

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha pokok pada suatu lembaga perbankan. Usaha pengkreditan menjadi sumber pendapatan yang utama bagi bank. Sumber pendapatan yang utama ini harus mendapat pengamanan yang memadai serta dapat terhindar dari pengamanan yang memadai serta dapat terhindar dari segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan serta menghambat kegiatan bank, dengan diterapkan pengendalian intern yang memadai.

Lestari, Diah & Topowijono, (2013) pengendalian intern yaitu usaha untuk menjaga kredit yang disalurkan tetap lancar, produktif dan tidak macet atau kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern Kredit Modal Kerja

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur penerapan intern dalam pengkreditan, bank dituntut dalam pengawasan atas tahap proses-proses pemberian kredit yang dilakukan. Pengawasan kredit merupakan tahap lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan upaya agar kredit yang dilakukan dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Tujuan pengendalian intern bagi lembaga keuangan yaitu:

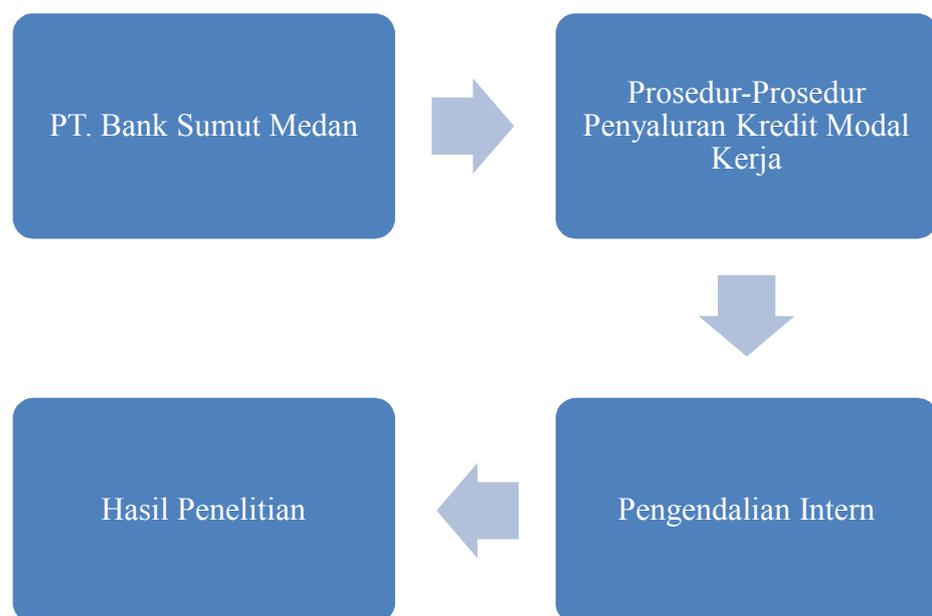
1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan ini lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu di sempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi presentase *collectibility credit* yang disalurkan lembaga keuangan.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit lembaga keuangan.

Pengawasan atau pengendalian kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai aset atau kekayaan bank telah dilakukan dengan baik timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

2.5 Kerangka Berpikir

Sistem Pengendalian Intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ undang undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan

sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Salah satu sistem pengendalian intern yang mutlak harus dimiliki perusahaan adalah sistem pengendalian intern kas. Karena kas merupakan harta yang paling lancar (*liquid*) yang paling mudah disembunyikan dan dihilangkan. Oleh karena itu sistem pengendalian intern kas perlu disusun dengan cermat, berhati-hati dan lengkap.



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek serta dimana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini yang akan menjadi objek adalah penerapan Pengendalian Intern atas Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank SUMUT Medan yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 18, Medan, Sumatera Utara.

1.1 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sari & Zefri, 2019 Data primer adalah data yang diambil langsung dari perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisisioner.” Data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah informasi-informasi yang akurat yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden (*teller*) untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Metode ini bertujuan untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan landasan bahasa skripsi dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari sumber buku bacaan, jurnal, atau proposal penelitian dan situs website yang berhubungan erat dengan bahasa skripsi.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, dengan peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan perusahaan.

1.3 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap penelitian dan pengumpulan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan:

- a. Metode dekriftif, Rusandi & Muhammad Rusli, 2021 yaitu dengan mengumpulkan data. Penyusunan dan pengklasifikasi serta mengidentifikasi sehingga memberikan gambaran umum mengenai kebijakan yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

- b. Metode Komparatif

Metode analisis komparatif adalah metode analisis penelitian yang bersifat perbandingan. Yang digunakan untuk membandingkan teori mengenai pengendalian intern atas penyaluran kredit modal kerja secara umum dengan pengendalian intern atas penyaluran kredit modal kerja yang diterapkan pada PT Bank Sumut Medan. Berdasarkan data yang

diperoleh maka akan ditarik kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat digunakan oleh PT Bank Sumut Medan kelak sebagai pertimbangan pengendalian intern atas penyaluran kredit modal kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.